

PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Endah Purnama Sari¹; Yuliana Gunawan²; Elvina³

Universitas Kristen Maranatha, Bandung^{1,2,3}

Email : endah.eps@gmail.com

ABSTRAK

Peneliti memiliki ketertarikan untuk menguji dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak dengan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung. Data akan dianalisis dan diolah menggunakan SPSS dengan uji regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kepercayaan; Insentif Pajak; Manfaat Pajak

ABSTRACT

Researchers are interested in testing and analyzing how much influence trust in the government, incentive policies and tax benefits have on taxpayer compliance. The sample of this research is the taxpayers of Small and Medium Enterprise (SME) in the city of Bandung. The data will be analyzed and processed using SPSS with multiple regression test. The results show that both partially and simultaneously trust in the government, tax incentive policies and tax benefits have an effect on taxpayer compliance.

Keywords : Trust; Tax Incentives; Tax Benefits

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, dimana dunia mengalami pandemi wabah korona yang berimbas pada seluruh sektor usaha diseluruh dunia termasuk di Indonesia, disatu sisi pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk alokasi dana bagi penanggulangan wabah korona, pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar , namun disisi yang lain, dunia usaha mengalami keterpurukan sehingga pemerintah harus dapat membangun kepercayaan publik, memberikan insentif dan manfaat perpajakan bagi dunia usaha terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

Kirchler et al (2008) mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan pendapat umum yang dianut oleh seseorang dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial ini

menggambarkan penerimaan seseorang terhadap suatu otoritas. Kepercayaan masyarakat ini sangat diperlukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bekerja bukan hanya untuk kepentingan golongan melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di Indonesia yang dikarenakan wabah virus korona membuat para pengusaha tidak mampu untuk membayar pajaknya. *International Tax Glossary* (Nurmantu, 2003) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasari prinsip *ability to pay* yaitu seharusnya pajak dipungut dengan memperhatikan kemampuan seseorang dalam membayarkan pajak. Disatu sisi dana yang sangat besar dibutuhkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah virus korona ini dan dana tersebut dapat diperoleh dari sektor pajak. Namun disisi lain, apabila masyarakat tetap dibebani untuk membayar pajak oleh pemerintah pada saat terpuruknya kondisi ekonomi, ini merupakan hal yang sangat tidak bijaksana. Oleh karena hal tersebut, sejumlah kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu insentif pajak dengan harapan patuhnya wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat ditingkatkan.

Wajib pajak yang merasakan manfaat pajak juga mempengaruhi patuhnya wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Pemahaman atas manfaat pajak merupakan penilaian atau anggapan wajib pajak mengenai manfaat yang diperolehnya dari apa yang telah ia bayarkan (Wibowo, 2018). Menurut Wibowo (2018), manfaat pajak merupakan faedah atau guna yang wajib pajak rasakan setelah menjalankan kewajibannya membayar pajak. Dalam Ummami (2015), dikatakan bahwa jika manfaat dalam membayar pajak tidak dirasakan, maka wajib pajak lebih memilih mengabaikan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak merasakan manfaat atau keuntungan yang tinggi dari membayarkan pajak, maka pola pikir mengenai pentingnya membayar pajak akan terbentuk dan juga akan mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya. Adanya pajak yang memberikan manfaat positif akan meningkatkan peluang yang besar dalam memotivasi wajib pajak agar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Gunadi (2002) menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam berbagai penelitian berkenaan dengan

kepatuhan wajib pajak adalah pendekatan ekonomi dan berperilaku. Temuan yang tidak konsisten telah dihasilkan dari pendekatan-pendekatan ini.

Terdapat tiga variabel independen yang diterapkan oleh peneliti yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2005 James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler melakukan penelitian dan menemukan bahwa sistem pemerintahan tidak secara signifikan mempengaruhi keinginan wajib pajak karena kebanggaan nasional dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang tinggi. Sementara Jorge Martinez-Vazquez et al (2020) menemukan bahwa moral pajak dipengaruhi secara positif oleh adanya kepercayaan pada organisasi pemerintah. Penjelasan dalam penelitian Wibowo (2018) juga memperkuat penelitian ini, bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap dorongan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara. Ditemukan dalam penelitian Raihana Mohdali, Nik Nadzirah Nik Mohamed (2019) bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah. Jacob Bundrick (2016) menemukan bahwa negara Arkansas berpotensi lebih makmur akibat adanya keringanan pajak. Dari pendapat tersebut, diasumsikan bahwa insentif keuangan memang merupakan faktor penentu di mana perusahaan berada.

Fiscal Psychology Model digunakan dalam penelitian Komara (2019). Model ini menekankan bahwa adanya kekurangan manfaat atau keuntungan yang diterima atau dirasakan oleh wajib pajak yang membayarkan pajaknya, baik dalam bentuk finansial maupun barang publik dapat menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan. Paradigma ini mengeksplorasi dampak isu-isu ekonomi dan kebijakan pemerintah terhadap sikap masyarakat dengan tujuan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan.

Komara (2019) menyatakan bahwa data non persepsi memang tidak dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan otoritas pajak. Oleh karena hal tersebut, tingkat kepercayaan berdasarkan penilaian responden yang digambarkan melalui data persepsi responden selalu digunakan dalam penelitian yang mengkaji kepercayaan wajib pajak, seperti penelitian Ratmono pada tahun 2014 yang berjudul Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak. Hasil uji hipotesisnya yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh dari sanksi perpajakan dan kebijakan

prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun responden tidak memiliki kepercayaan tinggi terhadap otoritas pajak, namun kepercayaan tersebut telah dapat menguatkan pengaruh dari sanksi perpajakan dan kebijakan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan yang didapatkan dari penjelasan tersebut adalah semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka pengaruh yang diberikan terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi juga. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan insentif pajak yang pemerintah berikan. Semakin tinggi atau banyaknya manfaat yang diterima oleh wajib pajak setelah membayar pajaknya, maka semakin berpengaruh juga terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepercayaan kepada pemerintah mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kebijakan Insentif mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Manfaat Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak?

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini ingin mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan uji dan analisis mengenai seberapa besar pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Melakukan uji dan analisis mengenai seberapa besar pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Melakukan uji dan analisis mengenai seberapa besar pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Melakukan uji dan analisis mengenai seberapa besar pengaruh Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif, Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

Peneliti juga ingin mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan di lingkungan akademis.

2. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi pemerintah khususnya memberikan informasi apakah pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam rangka peningkatan penerimaan negara di sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal yang sama secara lebih mendalam.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Terdapat tiga variabel independen yang diterapkan oleh peneliti yaitu kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel independen ini didukung oleh hasil peneliti terdahulu yang menunjukkan pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wibowo (2018) menjelaskan bahwa pihak pemerintah yang percaya kepada masyarakat akan menjadikan masyarakat juga percaya kepada pihak pemerintah. Jika kinerja nyata kepada masyarakat ditunjukkan oleh pemerintah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan timbul. Dalam hal menurunnya rasa percaya rakyat, Moore (2004) menyarankan pemerintah untuk mengambil inisiatif. Pemerintah harus mengemas kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat. Penelitian terdahulu yang mendukung teori ini antara lain: penelitian Jorge Martinez-Vazquez et.al (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak dipengaruhi oleh kepercayaan pada organisasi pemerintah secara positif. Penelitian yang dilakukan Wibowo (2018) juga memperkuat penelitian ini, di dalamnya menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pihak pemerintah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap dorongan pemenuhan

kewajiban perpajakan di KPP Makassar Utara. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menguji hipotesis sebagai berikut :

H1: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

International Tax Glossary (Nurmantu, 2003) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasari prinsip ability to pay yaitu seharusnya pajak dipungut dengan memperhatikan kemampuan seseorang dalam membayarkan pajak. Disatu sisi dana yang sangat besar dibutuhkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah virus korona ini dan dana tersebut dapat diperoleh dari sektor pajak. Namun disisi lain, apabila masyarakat tetap dibebani untuk membayar pajak oleh pemerintah pada saat terpuruknya kondisi ekonomi, ini merupakan hal yang sangat tidak bijaksana. Oleh karena hal tersebut, sejumlah kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu insentif pajak sehingga pemerintah berharap wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya. Penelitian terdahulu yang mendukung teori ini yaitu penelitian Latief, Salman., et al (2020) mengatakan bahwa insentif pajak pengaruh signifikan dan positif terhadap dorongan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Hasil yang ditunjukkan adalah insentif pajak pemerintah berikan dapat membuat wajib pajak termotivasi dan tersadari akan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan menguji hipotesis sebagai berikut :

H2: Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ummami (2015), mengatakan bahwa jika manfaat dalam membayar pajak tidak diberikan, maka wajib pajak cenderung memilih tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika pembayar pajak merasakan manfaat yang tinggi dari membayar pajak, maka pola pikir mengenai pentingnya membayar pajak akan terbentuk dan juga akan mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya. Adanya pajak yang memberikan manfaat positif akan meningkatkan peluang yang besar dalam memotivasi wajib pajak agar patuh memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian terdahulu yang mendukung teori ini yaitu Oroh (2013), Razak & Adafula (2013), Reraton &

Suandy (2015). Pada penelitian tersebut telah dibuktikan bahwa kewajiban perpajakan akan dilaporkan oleh wajib pajak bila mereka merasakan manfaat dari membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti akan menguji hipotesis sebagai berikut :

H3: Manfaat Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan peneliti terdahulu, Latief, Salman., et al (2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial serta secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian sebagai berikut :

H4: Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar model penelitian dapat dilihat pada lampiran gambar 1.1.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepercayaan kepada Pemerintah

Pada tahun 2008, Kirchler et al menerangkan dalam penelitiannya bahwa kepercayaan masyarakat merupakan pendapat umum yang dianut oleh seseorang dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak. Kepercayaan sosial ini menggambarkan penerimaan seseorang terhadap suatu otoritas. Kepercayaan masyarakat ini sangat diperlukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bekerja bukan hanya untuk kepentingan golongan melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Wibowo (2018) menjelaskan bahwa pihak pemerintah yang percaya kepada masyarakat akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika kinerja nyata kepada masyarakat ditunjukkan oleh pemerintah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan timbul. Dalam hal menurunnya rasa percaya rakyat, Moore (2004) menyarankan pemerintah untuk mengambil inisiatif. Pemerintah harus mengemas kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat.

Kebijakan Insentif Pajak

International Tax Glossary (Nurmantu, 2003) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasari prinsip *ability to pay* yaitu seharusnya pajak dipungut dengan memperhatikan kemampuan seseorang dalam membayarkan pajak. Disatu sisi dana

yang sangat besar dibutuhkan oleh pemerintah untuk penanggulangan wabah virus korona ini dan dana tersebut dapat diperoleh dari sektor pajak. Namun disisi lain, apabila masyarakat tetap dibebani untuk membayar pajak oleh pemerintah pada saat terpuruknya kondisi ekonomi, ini merupakan hal yang sangat tidak bijaksana. Oleh karena hal tersebut, sejumlah kebijakan fiskal dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu insentif terkait pajak dengan harapan wajib pajak semakin patuh.

Insentif terkait pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona. Peraturan ini mulai berlaku pada April 2020. Bentuk insentif pajak yang diberikan terdiri dari : Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 atas Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif Pajak Pertambahan Nilai.

Insentif yang diberikan oleh beberapa negara berkembang bertujuan agar kegiatan investasi atau penanaman modal dapat ditingkatkan. Dengan adanya investasi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut.

Beberapa faktor selain pajak yang mendorong untuk investasi, seperti tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, biaya energi dan modal dapat menimbulkan keuntungan dari adanya insentif pajak. Menurut Easson dan Zolt (2003), negara yang menerapkan insentif pajak akan mendapatkan manfaat dan keuntungan bila insentif pajak tersebut mengakibatkan terdapatnya keputusan investasi.

Manfaat Pajak

Butarbutar dkk, (2014) menerangkan bahwa wajib pajak merasakan manfaat pajak artinya wajib pajak dapat menerima atau merasakan guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak. Semakin tinggi wajib pajak merasakan manfaatnya, maka akan membuat cara pikir tentang esensinya pelaporan perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak akan merasakan manfaat dari membayar pajak secara menyeluruh untuk kemakmuran masyarakat. Hasil penelitian Doerrenberg dan Peichl pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat akan membayar pajak dengan lebih patuh ketika ada timbal balik dari pihak pemerintah berupa fasilitas publik. Pemerintah yang meningkatkan layanan publik, membangun infrastruktur, bantuan kesehatan hingga sekolah merupakan beberapa rupa manfaat atau keuntungan fasilitas publik yang dapat dirasakan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai Wajib Pajak Patuh yaitu : 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengelompokkan kepatuhan menjadi dua, yaitu :

1. Kepatuhan administratif, yaitu kepatuhan pada aturan administratif seperti pembayaran tepat waktu. Pengertian yang termuat dalam kepatuhan administratif meliputi syarat pelaporan, kepatuhan prosedur atau kepatuhan akan aturan.
2. Kepatuhan teknis, yaitu kepatuhan yang dilakukan dengan menghitung pajak sesuai dengan syarat teknis hukum pajak dan wajib pajak membayar bagian pajak yang harus mereka bayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk loyalitas wajib pajak pada aturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020).

Jenis Penelitian

Peneliti memiliki tujuan untuk melakukan uji dan analisis mengenai ada atau tidaknya pengaruh atau efek. Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang diterapkan yaitu pengujian hipotesis yang hasilnya mengarah pada penerimaan suatu hipotesis atau penolakan terhadap suatu hipotesis. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan metode Survei. Menurut Jogiyanto (2014), metode survei adalah metode dengan

cara mengumpulkan data primer melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden individu. Peneliti membuat survei dengan bentuk pernyataan – pernyataan untuk penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini memiliki populasi yaitu seluruh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung. Sampel yang diambil untuk penelitian ini berbasis pada *probabilitas* (pemilihan secara random) yaitu dengan metode random sederhana (*simple random*). Menurut Jogiyanto (2014), *simple random* (random sederhana) merupakan sampel yang diambil langsung dari populasinya secara acak.

Sampel

Sugoyono (2017) memberikan pengertian bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi Sampel dapat digunakan oleh seorang peneliti apabila keseluruhan populasi yang ada (populasi dalam jumlah besar) tidak dapat dipelajari oleh peneliti tersebut, misalnya dikarenakan oleh waktu, tenaga, dan dana peneliti yang terbatas. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik untuk mengambil sampel dari suatu populasi yang ada dengan berdasarkan suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Dengan karakteristik yang sudah ditetapkan yaitu setiap wajib pajak orang pribadi yang telah menjalankan usaha dan tergolong dalam klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Bandung. Dikarenakan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2020 tidak dapat diketahui jumlahnya maka sampel ditentukan menggunakan rumus Supramono.

$$n = \frac{(Z\alpha)^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

Keterangan :

- n = Jumlah sampel
- α = Derajat kepercayaan
- Bila $\alpha = 0,05$, maka $Z\alpha = 1,67$
- Bila $\alpha = 0,01$, maka $Z\alpha = 1,96$
- p = Proporsi yang diestimasi
- q = 1 - p
- d = Estimasi kesalahan yang dapat ditolerir

Karena nilai proporsi dalam populasi penelitian ini tidak dapat diketahui maka proporsi dianggap sama dengan 0,5 yaitu nilai dari $p(1 - p)$ yang maksimum (Modul

Statistika II UNPAD, 2014). Dan tingkat estimasi kesalahan yang dapat di tolerir (d) yaitu sebesar 10%. Maka penelitian ini menggunakan sampel sebanyak :

$$n = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,1^2} = 96 \text{ Wajib Pajak (Sampel Minimal)}$$

Definisi Operasional Variabel (DOV)

Terdapat 3 variabel bebas (independent), yaitu : Kepercayaan kepada pemerintah (X_1), Kebijakan Insentif Pajak (X_2), dan manfaat pajak (X_3). Penelitian ini juga menggunakan 1 (satu) variabel dependen, yaitu : Kepatuhan Wajib Pajak. Tabel 1 merupakan tabel yang menjelaskan mengenai definisi operasional variabel.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan angket yang dibuat dalam bentuk pernyataan. Adapun cara untuk memperoleh data pada penelitian ini yaitu dengan meminta responden untuk mengisi angket yang telah disediakan oleh peneliti. Kuesioner ini menggunakan skala rating berupa Skala Likert (*Likert Scale*). Menurut Jogiyanto (2014) skala likert digunakan untuk mengukur respons subjek ke dalam 5 poin skala dengan interval yang sama.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data statistik inferensial. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa statistik inferensial merupakan teknik statistik yang peneliti gunakan dalam melakukan analisis data sampel yang selanjutnya hasil dari analisis tersebut diberlakukan pada jumlah populasi yang tersedia. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa pengujian yaitu :

1. Uji Kualitas Data

Peneliti menerapkan teknik pengolahan data menggunakan komputer dengan bantuan program pengolahan data yaitu SPSS statistics 25 (*Statistical Product and Service Solution*). Untuk mengolah data, peneliti melakukan pengujian terhadap uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas, uji realibilitas.

Uji Validitas

Menurut Jogiyanto (2014), disebutkan bahwa uji validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan penggunaan uji validitas ini adalah untuk menguji valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini yaitu :

- Jika r hitung $>$ r tabel, maka item pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan valid.
- Jika r hitung $<$ r tabel, maka item pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Realibilitas

Dalam Jogiyanto (2014), uji reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurannya. Keputusan yang diambil dalam uji realibilitas didasari oleh hal sebagai berikut :

- Jika nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.
- Jika nilai Cronbach's Alpha $<$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan dengan pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria pengujian yang digunakan menurut Ghozali (2016) adalah:

- (1) Apabila nilai Asymp. Sig $>$ α , maka data terdistribusi secara normal;
- (2) Apabila nilai Asymp. Sig $<$ α , maka data tidak terdistribusi secara normal

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) menjelaskan tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi dikatakan baik jika tidak ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Variabel-variabel ini dikatakan tidak ortogonal jika ditemukan bahwa variabel independen menunjukkan adanya korelasi. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Data terbebas dari multikolinearitas jika memenuhi kriteria nilai *Tolerance* $>$ 0,1 dan *VIF* $<$ 10.

Uji Heteroskedasitas

Ghozali (2016) menjelaskan tujuan uji heteroskedasitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, disebut Homoskedositas dan jika berbeda disebut Heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedasitas atau tidak terjadi Heteroskedasitas. Uji Scatterplots dan uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heterokedasitas.

Uji Scatterplots melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Data dianggap terbebas dari heteroskedasitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2016).

Analisis dengan grafik plots memerlukan uji statistik yang lebih menjamin hasil yang akurat karena analisis tersebut memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003). Data dianggap terbebas dari Heteroskedasitas jika memenuhi kriteria $Asymp\ sig > \alpha$.

3. Uji Hipotesis

Hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian ini dijawab dengan metode analisis regresi berganda disertai dengan uji F, koefisien determinasi (R^2), dan uji t.

Analisis Regresi Berganda

Karena terdapat lebih dari satu variabel independen, maka peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Semua data dianalisis menggunakan *Statistical Package for Sosial Science (SPSS) for Windows* dengan persamaan berikut ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X_1 = Kepercayaan kepada pemerintah
- X_2 = Kebijakan Insentif Pajak
- X_3 = Manfaat Pajak
- e = *Error*

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji join hipotesa bahwa $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, secara simultan sama dengan nol (Ghozali, 2016). Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X_1, X_2 , dan X_3 . Dengan menggunakan angka probabilitas signifikan

- a. Apabila $sig. \leq 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_A diterima
- b. Apabila $sig. > 0,05$, maka H_0 diterima atau H_A ditolak

Uji Statistik (*t-test*)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

1. Jika $asympt sig > 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_A ditolak atau H_0 diterima
2. Jika $asympt sig < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_A diterima atau H_0 ditolak

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016)

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data seluruh wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Bandung. Penelitian ini mengambil sampel yang berbasis pada *probabilitas* (pemilihan secara random) yaitu dengan metode random sederhana (*simple random*). Menurut Jogiyanto (2014) random sederhana (*simple random*) merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara langsung dari populasinya

secara random. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 100 responden.

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Seluruh item pertanyaan dikatakan valid karena besar nilai *pearson correlation* semuanya diatas nilai 0.2303, dapat dilihat dari tabel pada lampiran. Sedangkan seluruh variabel dikatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* diatas 0.6. (lihat lampiran).

2. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2017) Uji normalitas adalah uji yang dilakukan terlebih dahulu saat akan menguji suatu data, dimana uji normalitas memiliki kegunaan untuk memeriksa atau menilai normal atau tidaknya data yang digunakan.

Pengujian normalitas menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Variabel dikatakan terdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig* lebih besar daripada α . Taraf signifikansi (α) adalah sebesar 5% atau 0,05.

Kriteria :

Data terdistribusi normal apabila : *Asymp sig* > 0,05

Data tidak terdistribusi normal apabila : *Asymp sig* \leq 0,05

Berdasarkan tabel 2 (dapat dilihat pada lampiran) hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp Sig.* > α atau 0,102 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

3. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2016) menerangkan bahwa Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel *independent* yang ada. Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan *Variance Inflating Factor* (VIF) dan *tolerance* dimana bila *tolerance* \leq 0,10 dan *VIF* \geq 10 maka dapat dikatakan data terbebas dari multikolinearitas.

Melalui tabel 3 (dapat dilihat pada lampiran), hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa nilai seluruh variabel dikatakan terbebas dari Multikolinearitas karena memiliki nilai *Tolerance* > 0.1 dan nilai *VIF* < 10.

4. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2016) menerangkan bahwa uji heterokedastisitas adalah pengujian yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari *residual* suatu pengamatan dengan yang lainnya. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat hasil *assympt Sig.* dimana apabila *assympt Sig.* yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan *alpha* atau *assympt Sig.* $> \alpha$ maka data terbebas dari heterokedastisitas.

Berdasarkan tabel 4 (dapat dilihat pada lampiran) hasil uji heterokedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp Sig.* $> 5\%$ (0.05), hal ini menunjukkan data terbebas dari heteroskedastisitas.

5. Uji Regression Analysis

Berdasarkan tabel 5 (dapat dilihat pada lampiran) hasil uji regresi berganda, maka model regresi berganda adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Pengaruh secara parsial masing-masing variabel karena memiliki nilai *Sig* $< 5\%$ (0.05) yaitu Kepercayaan Kepada Pemerintah sebesar 0.013 ; Kebijakan Insentif sebesar 0.018 dan Manfaat Pajak sebesar 0.000.
2. Kepatuhan Wajib Pajak = $13.214 + 0.559 \text{ KKP} - 0.377 \text{ KI} + 0.890 \text{ MP}$.
3. “Variabel Kebijakan Insentif bersifat negatif terlihat dari persamaannya dan juga terlihat dari nilai t nya.

6. Koefisien Determinasi

Kriteria dari koefisien determinasi adalah *Asymp Sig.* $> 0,05$ = tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan *Asymp Sig.* $\leq 0,05$ = terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Berdasarkan tabel 6 (dapat dilihat pada lampiran), besarnya pengaruh simultan variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak kepada Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0.866 atau 86.6%.

7. Uji Signifikansi F

Dalam Ghozali (2016), diterangkan bahwa Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Melalui tabel 7 (dapat dilihat pada lampiran) mengenai hasil uji statistik F, kolom *Sig.* menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa

terdapat pengaruh simultan variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak kepada Kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai Sig. sebesar $0.000 < 5\%(0.05)$.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian di atas yaitu sebagai berikut :

1. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika kinerja nyata kepada masyarakat ditunjukkan oleh pemerintah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan timbul, dan hal tersebut akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.
2. Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat membuat wajib pajak termotivasi dan tersadari untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh.
3. Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika wajib pajak merasakan manfaat yang tinggi dari membayar pajak, maka pola pikir mengenai pentingnya membayar pajak akan terbentuk dan juga akan mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya.
4. Kepercayaan kepada pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti sampel penelitian yang hanya dilakukan di Kota Bandung, serta keterbatasan terkait kepatuhan wajib pajak dalam hal insentif dan kepercayaan kepada pemerintah. Oleh karena keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa hal yang dapat menjadi saran untuk penelitian berikutnya :

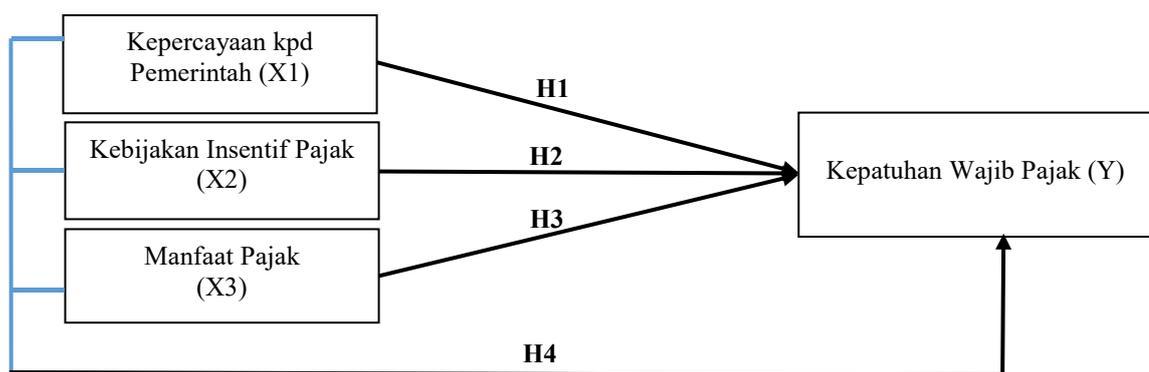
1. Sampel penelitian dapat diperluas sehingga memiliki hasil penelitian yang lebih akurat.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bukan hanya dilihat dari kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif dan manfaat pajak tetapi dapat dilihat dari faktor lain seperti penerimaan pajak terkait insentif dan hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bundrick, Jacob.(2016).Tax Breaks and Subsidies: Challenging the Arkansas Status Quo, *Arkansas Center for Research in Economics*.
- Butarbutar, Arian Sumando. Sabijono, Harijanto. Wokas, Heince R.N.(2014).Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Manfaat Pajak Restoran Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Usaha Restoran Di Kota Tomohomon), *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Doerrenberg, Philipp; Peichl ,Andreas.(2017). Tax morale and the role of social norms and reciprocity Evidence from a randomized survey experiment , *IFO Working Paper No.242, Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich*.
- Easson A & Zolt E.M.(2003). *Tax Incentives*. Paper prepared for World Bank Course on practical issues of Tax Policy in Developing Countries.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar.(2003). *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Gunadi. (2002).*Indonesian Taxation; A Reference Guide*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, and Benno Torgler.(2005).Russian Attitudes Toward Paying Taxes –Before, During, And After The Transition. *Journal of PublicEconomics. Rusia*.
- Jorge Martinez-Vazquez at.al .(2020).Trust in Government Institutions and Tax Morale. International Center for Public Policy *Working Paper 20-01*.Copyright 2020, the Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Jogiyanto.(2014).*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*,EdisiKe9,BPEF,Yogyakarta.
- Kirchler, E., E. Hoelzl & I. Wahl.(2008).Enforced versus Voluntary TaxCompliance: The“Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology, Vol. 29: 210-225*.
- Komara, Ratna;Widyastuti, Arie; Layyinaturobbaniyah.(2019). Financial Literacy and Demography Characteristics Among Indonesian Millenials, *proceedings 2019 International Conference on Organizational Innovation (ICOI 2019)*, Publication date: Oktober 2019, DOI: <https://dx.doi.org/10.2991/icoi-19.2019.15>, ISBN: 978-94-6252-806-2.
- Latief,Salman; Zakaria,Junaidin; Mapparenta.(2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Center of Economic Student Journal , Vol. 3 No. 3 (2020): Juli, ISSN:2621-8186 (online), ISSN:2621-8194 (Print)*.
- Moore, M.(2004).,Revenues, state formation, and the quality of governance in developingcountries. *International Political Science Review, 25, 297-319*.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oroh, N. D.(2013).Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan di Minahasa. *Jurnal EMBA*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan. Diperoleh dari

- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/192~PMK.03~2007Per.htm> pada tanggal 20 Maret 2020.
- Razak, A. A., & Adafula, C. J.(2013). Evaluating taxpayers' attitude and its influence on taxcompliance decisions in Tamale, Ghana. *AcademicJournals*.
- Raihana Mohdali, Nik Nadzirah Nik Mohamed.(2019).Trust in Government and Perceptions of Tax Compliance among Adolescents. *Journal of Advanced Research Design* 61, Issue 1 (2019) 19-29. *Journal homepage: www.akademiabaru.com/ard.html* ISSN: 2289-7984.
- Ratmono, D. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan pada otoritas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 18 (1): 42-64.
- Reraton, Leonardus Gading Liman dan Suandy, Erly.(2014). Pengaruh Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi tentang Manfaat terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan PP No. 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo. *e-Journal UAJY*.
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ummami, K.(2015) Pengaruh MANfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi pajak, dan Penghasilan wajib Pajak terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*.
- Wibowo Trisetyawan.(2018). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial dan Kecerdasan Spritual Terhadap Motivasi Membayar di KPP Makassar Utara. *Tesis Maksi UMI*.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Model Penelitian

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepercayaan kepada Pemerintah (X1)	sikap wajib pajak atau masyarakat terhadap Pemerintah berupa tindakan, sikap, dan moralitas yang tercermin dari kebijakan pemerintah yang pro pada kepentingan Masyarakat	1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 2. Kepercayaan Kepada Sistem Hukum 3. Kepercayaan terhadap Pemungutan Pajak yang dikembalikan kembali ke rakyat	Likert
Kebijakan Insentif Pajak (X2)	Sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional	1. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 2. Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak	Likert
Manfaat Pajak (X3)	Persepsi wajib pajak terhadap manfaat langsung yang diterimanya sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya	1. Fasilitas umum dan infrastruktur 2. Pertahanan dan keamanan, 3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya 4. Dana Pemilu	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sikap ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tepat waktu	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 2. Menghitung pajak 3. Membayar pajak 4. Melaporkan	Likert

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.02520571
Most Extreme Differences	Absolute	0.122
	Positive	0.122
	Negative	-0.070
Test Statistic		0.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.102

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.214	1.145		11.540	0.000		
	TOTAL_KKP	0.559	0.218	0.463	2.563	0.013	0.589	6.981
	TOTAL_KI	-0.377	0.280	-0.269	-1.346	0.018	0.479	2.883

	TOTAL_MP	0.890	0.186	0.747	4.774	0.000	0.784	2.752
a. Dependent Variable: TOTAL_KWP								

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.186	0.594		1.997	0.050
	TOTAL_KKP	0.122	0.113	0.525	1.082	0.283
	TOTAL_KI	-0.323	0.145	-1.194	-2.220	0.298
	TOTAL_MP	0.148	0.097	0.642	1.528	0.131
a. Dependent Variable: ABS						

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.214	1.145		11.540	0.000
	TOTAL_KKP	0.559	0.218	0.463	2.563	0.013
	TOTAL_KI	-0.377	0.280	-0.269	-1.346	0.018
	TOTAL_MP	0.890	0.186	0.747	4.774	0.000
a. Dependent Variable: TOTAL_KWP						

Sumber: SPSS 24

Tabel 6. Hasil *Adjusted R*²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.934 ^a	0.871	0.866	2.07005
a. Predictors: (Constant), TOTAL_MP, TOTAL_KKP, TOTAL_KI				

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1947.095	3	649.032	151.462	0.000 ^b
	Residual	287.102	67	4.285		
	Total	2234.197	70			
a. Dependent Variable: TOTAL_KWP						
b. Predictors: (Constant), TOTAL_MP, TOTAL_KKP, TOTAL_KI						

Sumber: SPSS 24